

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Khoirul Umam. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Rasail.Semarang.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media Grup.
- Ath thuraiqi, Abdullah.1982. *Jarimatur Risywah fisy Syariah Islamiyah ma'a Dirasat an Nizham Mukafahat Al RisywahFil Mamlakah Al Arabiyah As Saudiyah*. Cetakan III.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Beddy Iriawan Maksudi. 2015. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bernard L. Tanya. 2006. *Hukum, Politik, dan KKN*. Surabaya: Srikandi.
- C.S.T Kansil. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Balai Jakarta. Jakarta.
- Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia*. PolGov Fisipol Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Erwandi Tarmizi. 2011. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. P.T. Berkat Mulia Insani. Bogor.
- Heru Nugroho. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta.

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2007. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- L. Sumartini. 2004. *Money Politics dalam Pemilu*. Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Miftah Toha. 2010. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Miriam Budihardjo. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta.
- Moh Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- M Said Mas'ud. 2009. *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah, dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*, UMM Press.
- Saldi Isra. 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Themis Publishing. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soegono Soekanto dan Sri Pamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soejono Soekanto. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Prasyawidia Pratama.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991 *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung.
- Syamsuddin Haris. 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan?*. Erlangga. Jakarta.
- Thahjo Kumolo. 2015. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. PT Mizan Publika. Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/
atau Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan
Hasil Pemilukada Jawa Timur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan
Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat

C. Website/ Jurnal/ Makalah

<https://kbbi.web.id/politik>. Diakses pada 12 Januari 2019, Pukul 14.20 WIB.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-money-politic/11179/2>.

Diakses pada 15 Maret 2019, pukul 21.50 WIB.

<https://news.okezone.com/read/2018/07/19/340/1924729/kasus-money-politic-timses-pemenang-pilkada-lahat-dituntut-36-bulan-penjara>. Diakses pada 3

April 2019, pukul 07.07 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang. Diakses pada 29 April 2019, pukul 17.39 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>. diakses pada 7 Mei 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/14032641/soal-aturan-biaya-transportasi-dan-makan-saat-kampanye-kpu-gunakan-permenkeu>. Diakses pada 29 Juli, pukul 08.53 WIB.

Didik Supriyanto. Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu. Http://

Www.Panwaslu. Jum'at.

Agus Riewanto. 2019. *Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak*. Jurnal Antikorupsi. Vol. 5.

Almas Ghaliya Putri Sjafrina. 2019. *Dampak Politik Uang terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1).

Armen Yasir dan Jauhari M. Zailani. 2003. *Pola Money Politics dalam Suksesi Kepala Daerah di Provinsi Lampung*”, Makalah disampaikan pada *Seminar Internasional ke-4, Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi* yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik-Salatiga, 14-18 Juli.

Feri Amsari dan Hemi Lavour Febrinandez. 2019. *Menjerakan Pelaku “Uang Mahar” Pemilu*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS Vol.5 (1).

Indah Sri Utari. 2016. *Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*. Vol. 2 Nomor 1.

Juniadi, Veri. (2012). *Identifikasi Politik Uang dalam Pemilukada*. Jurnal Ilmu Hukum YUSTISIA, 19.

Sugiharto, Imawan. 2016. *Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal. Vol. 3.

